

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menimbulkan dinamika sosial yang kompleks, khususnya bagi masyarakat lokal, yang terdiri dari masyarakat adat dan pendatang, di Kecamatan Sepaku yang terdampak langsung oleh transformasi wilayah tersebut. Penelitian ini mengkaji dampak pembangunan, dimana kerusakan dan perubahan alam yang terjadi berdampak bagi seluruh masyarakat lokal. Namun, terdapat dampak khusus bagi masyarakat adat yang akan digali secara mendalam di penelitian ini, dimana pembangunan IKN menyebabkan terjadinya pergeseran habitus yang telah dipertahankan turun temurun. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk partisipasi masyarakat, serta upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pembangunan IKN.

Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini menggali pengalaman dan persepsi masyarakat lokal, terutama kelompok adat sebagai subjek utama dalam perubahan sosial dan budaya yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan IKN sangat berdampak bagi masyarakat lokal, dimana perubahan ruang dan lahan telah berdampak pada akses air bersih, lahan pertanian, hutan dan sumber alam lainnya. Bagi masyarakat adat, pembangunan IKN memicu pergeseran *habitus* yang ditandai oleh perubahan pola hidup, relasi sosial, serta nilai-nilai budaya yang terinternalisasi. Selain itu, ditemukan berbagai bentuk partisipasi masyarakat adat dalam merespons pembangunan. Di sisi lain, pemerintah melakukan sejumlah upaya resolusi, seperti pemberian kompensasi dan program relokasi. Meskipun demikian, proses-proses tersebut kerap kali belum sepenuhnya mempertimbangkan struktur sosial dan kearifan lokal masyarakat adat, sehingga menimbulkan ketegangan dalam relasi antara negara dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga membawa implikasi terhadap tatanan sosial-budaya masyarakat lokal, menuntut adanya pendekatan partisipatif dan sensitif terhadap konteks lokal dalam setiap kebijakan pembangunan.

*The development of the new capital city (IKN) in East Kalimantan has generated complex social dynamics, particularly for the local communities comprising indigenous peoples and migrants in Sepaku District, which is directly affected by the transformation of the area. This study examines the impact of development, where environmental damage and changes affect the entire local population. However, there are specific impacts on indigenous communities that will be explored in depth in this research, as the construction of IKN has caused a shift in habitus that has been preserved for generations. In addition, this study aims to analyze the forms of community participation and the conflict resolution efforts undertaken by the government in the IKN development process.*

*Using a qualitative method with a phenomenological approach, the research explores the experiences and perceptions of local communities, especially indigenous groups as the main subjects in the social and cultural changes taking place. The results show that the development of IKN has significantly impacted local communities, with changes in space and land affecting access to clean water, agricultural land, forests, and other natural resources. For indigenous peoples, the IKN development has triggered a shift in habitus, marked by changes in lifestyle, social relations, and internalized cultural values. Furthermore, various forms of indigenous community participation in responding to development were found. On the other hand, the government has made several resolution efforts, such as providing compensation and relocation programs. Nevertheless, these processes often do not fully consider the social structures and local wisdom of indigenous communities, resulting in tensions in the relationship between the state and society. This study concludes that the development of IKN is not only physical in nature, but also brings implications for the socio-cultural order of local communities, demanding a participatory and locally sensitive approach in every development policy.*